

BAB VI

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Letak geografis perairan Indonesia yang strategis berada diantara dua benua (Asia-Australia) dan dua Samudera (Hindia-Pasifik), perairannya memiliki sumber daya perikanan yang berlimpah serta merupakan jalur perdagangan internasional yang banyak dilintasi kapal-kapal asing.. Dengan posisinya yang strategis ini, Indonesia tidak hanya menghasilkan keuntungan tetapi juga dihadapkan dengan berbagai ancaman-ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara. Ancaman-ancaman yang muncul ini terfokus pada keamanan maritim. Inilah yang menjadi aspek penting yang menjadi perhatian besar Indonesia.

Keamanan maritim merupakan bagian dari konsep keamanan secara tradisional. Berakhirnya perang dingin dan dengan adanya kemajuan dalam bidang teknologi menjadikan munculnya ancaman-ancaman yang semakin beragam dan semakin besarnya peran yang dimainkan oleh aktor non-negara yang menyebabkan pergeseran isu-isu keamanan. Pergeseran isu-isu keamanan yang pada awalnya menitikberatkan pada kekuatan militer untuk melindungi kepentingan nasional dari ancaman yang berasal dari negara lain, kini mengarah pada isu-isu keamanan non-tradisional yang meliputi masalah keamanan intranegara dan ancaman keamanan lintas batas negara.

Ancaman keamanan maritim di Indonesia yang berkaitan dengan kemunculan keamanan non-tradisional yang sifatnya asimetris. Meningkatnya ancaman keamanan non-tradisional yang berasal dari dalam negara maupun luar negara, khususnya di wilayah perairan dan wilayah yuridiksi Indonesia, menuntut Indonesia secara aktif untuk melakukan pengawasan, pencegahan dan pengamanan dari berbagai bentuk potensi konflik seperti *transnational crime*. Dalam hal ini ancaman non-tradisional mengarah pada *transnational crime* yang salah satunya menjadi perhatian serius dan khusus pada masalah keamanan maritim, yaitu *illegal, unregulated, unreported fishing*. Ancaman *illegal, unregulated* dan *unreported fishing* ini dipicu kondisi sektor perikanan global,

dimana beberapa negara mengalami penurunan stok ikan, pengurangan armada kapal penangkapan ikan akibat pembatasan pemberian izin penangkapan sedangkan permintaan produk perikanan meningkat.

Illegal, unregulated dan unreported fishing merupakan kejahatan laut yang perlu diwaspadai oleh negara maritim seperti Indonesia karena kegiatan-kegiatan ini dapat melemahkan kedaulatan negara. Dalam hal ekonomi, dimana Indonesia dirugikan triliunan rupiah karena aktifitas pelanggaran tersebut. Perikanan laut merupakan salah satu sumber daya alam yang menjadi potensi ekonomi kelautan yang menyebabkan para pelaku usaha perikanan Indonesia, terutama para nelayan kecil dengan alat tangkap ikan yang sederhana tidak optimal dalam pendapatan. Dalam hal sosial, dengan adanya kegiatan *illegal fishing* tersebut akan terjadi kerentanan sosial terhadap kehidupan nelayan maupun industri perikanan, karena ketersediaan sumber daya perikanan tertentu menjadi terbatas. Dalam hal lingkungan, dampak dari kegiatan *illegal fishing* dapat merusak ekosistem laut, mulai dari penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang hingga penangkapan ikan berlebih dengan jumlah yang tidak disesuaikan dengan izin yang berlaku. Juga dalam hal militer, adanya kegiatan *illegal fishing* merupakan isu pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh pihak asing, adapun pelaku pencurian ikan tersebut sebagai pelaku terorganisir, dengan begitu peran pengawasan yuridiksi perairan Indonesia perlu kemampuan pertahanan wilayah laut sebagai pengawas terdepan di wilayah yuridiksi Indonesia.

Kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum yang paling umum terjadi dan dilakukan oleh kapal berbendera asing adalah *illegal fishing* yang berupa pelanggaran administrasi dan menggunakan alat tangkap terlarang. Kemudian dari wilayah pengelolaan perikanan yang dimiliki Indonesia, beberapa wilayah merupakan wilayah yang paling rawan terhadap kegiatan *illegal fishing* seperti wilayah perairan Natuna, Selat Malaka, perairan Sulawesi Utara dan perairan di sekitar Maluku serta laut Arafura.

Melihat potensi sumber daya laut yang melimpah, Indonesia harus menjaga keamanan maritimnya dalam hal ini sektor perikanan dikarenakan Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas yang menyebabkan banyaknya lokasi-lokasi yang memungkinkan untuk terjadinya tindak kejahatan

IUU Fishing. Hal ini penting dilakukan Indonesia untuk menjaga kedaulatan, stabilitas kawasan dan menjaga kepercayaan di mata dunia internasional untuk Indonesia tegas dalam kasus tindak kejahatan *IUU Fishing*, sebagai kekuatan yang perlu diperhitungkan di mata dunia internasional.

Strategi keamanan maritim Indonesia dilakukan dengan berbagai cara. Strategi yang digunakan berbeda-beda sesuai pada tingkat domestik, regional dan internasional. Pada tingkat domestik, Indonesia memiliki strategi yaitu koordinasi antar institusi yang terkait keamanan laut. Strategi ini mengedepankan koordinasi antar institusi yang dimiliki dalam menjalankan tugas, peran dan wewenangnya masing-masing. Kemudian strategi Indonesia yang lain pada tingkat domestik yaitu setiap institusi yang terkait keamanan laut mempunyai strateginya sendiri dalam menjalankan tugas, peran dan wewenangnya masing-masing. Dalam hal ini penulis mencantumkan 3 (tiga) instansi yang berperan penting dalam keamanan laut khususnya *IUU Fishing*. Pertama Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai lembaga yang berstrategi dengan melakukan pengawasan optimal (patroli mandiri) di bidang kelautan dan perikanan dalam mengawal kedaulatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Kedua Bakamla, berstrategi dengan menjaga keamanan laut dengan melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yuridiksi Indonesia. Ketiga TNI AL, dengan tugas sebagai alat pertahanan negara berstrategi dengan melakukan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.

Pada tingkat regional, strategi keamanan maritim Indonesia yaitu dengan menjalin kerjasama dengan negara-negara di kawasan regional dan ikut bergabung dalam *ASEAN Maritime Forum*. Kerjasama dengan negara-negara tetangga yang berada dalam kawasan regional sangat dibutuhkan Indonesia. Hal ini dikarenakan perbatasan laut yang tidak pasti diperlukan untuk saling menjaga keamanan laut baik dalam patroli maupun pertukaran informasi dalam sebuah forum kerjasama regional. Kerjasama juga dilakukan Indonesia dalam hubungan bilateral dengan negara kawasan ASEAN, yaitu Vietnam dan Malaysia. Kedua negara berkomitmen untuk menangani tindak kejahatan *IUU Fishing* melalui kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan kedua negara. Kemudian strategi keamanan maritim lainnya di luar kawasan dalam hubungan bilateral adalah

menjalin kerja sama dengan Australia. Kerjasama kedua negara melalui kesepakatan-kesepakatan guna menghentikan eksploitasi sumber daya alam secara ilegal di wilayah yang menjadi kepentingan bersama. Kerjasama itu juga dilakukan dengan melaksanakan sebuah operasi gabungan oleh *Australia Border Force* (ABF), *the Australian Fisheries Management Authority* (AFMA) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk memerangin tindak kejahatan *IUU Fishing* di perairan Utara Australia.

Pada tingkat Internasional, strategi keamanan maritim Indonesia yaitu dengan melakukan kerjasama dengan negara-negara di luar kawasan regional dan ikut bergabung dalam IORA. Dengan bergabungnya Indonesia menjadi negara anggota IORA, Indonesia memiliki tanggung jawabnya dalam keikutsertaannya yaitu berkesempatan menjadi ketua atau pemimpin IORA pada periode tahun 2015-2017, penyelenggaraan KTT IORA, dan BEMC (*Blue Economy Ministerial Conference*) juga menginisiasi pembentukan IORA Concord untuk mengatasi isu-isu non-tradisional seperti *illegal fishing*, perdagangan manusia, peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang, imigran gelap dan pembajakan.

V.2 Saran

Strategi keamanan maritim Indonesia dalam menanggulangi ancaman keamanan laut khususnya *illegal fishing* diperlukan beberapa faktor penunjang untuk meningkatkan pelaksanaan dari strategi yang telah disusun. Dalam hal ini kontribusi kinerja institusi yang berwenang dalam keamanan laut harus lebih ditingkatkan lagi. Banyaknya institusi yang berwenang dalam keamanan laut menjadikan masih adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan keamanan laut.

Faktor penunjang lainnya berupa perlengkapan seperti kapal-kapal patroli yang lebih canggih dan terbaru untuk menyesuaikan perkembangan zaman dan teknologi kapal lain pada saat pengejaran kapal-kapal pelaku tindak kejahatan *illegal fishing*. Selain itu, diperlukan juga radar yang memadai untuk lebih cepat mendeteksi kapal ikan asing yang masuk di wilayah perairan yuridiksi Indonesia guna mempermudah institusi yang berwenang dalam menindak kejahatan *illegal fishing*.